



TITIK TEMU INDONESIA DALAM MELIHAT MASALAH TKI: PERSPEKTIF PUBLIC RELATION, AKTOR POLITIK, DAN JURNALIS SEBAGAI TIGA AKTOR PEMBENTUK KUALITAS *PUBLIC SPHERE*

Andri Dwi Nurdyantoro

Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Fenomena berulangnya kasus-kasus hukum yang menimpa TKI di luar negeri merupakan masalah yang serius. Mereka yang notabene adalah salah satu penyumbang devisa yang besar bagi negara Indonesia, pada kenyataannya kurang mendapatkan perhatian yang serius dari beberapa pihak yang terkait. Seharusnya ada penanganan yang serius dalam mencegah dan melindungi hak-hak mereka di negara dimana mereka bekerja. Perlunya mediasi antara pihak-pihak yang berwenang dalam menanggapi kasus-kasus hukum yang menimpa TKI ini dilakukan agar tidak muncul lebih banyak lagi kasus-kasus hukum yang menimpa mereka. Penciptaan public sphere yang berkualitas dalam media adalah bentuk mediasi yang paling baik bagi aktor-aktornya yakni Public Relations, Aktor Politik, dan Jurnalis.

Kata Kunci: Aktor, Public Sphere, Media, Jurnalis.

1 Pendahuluan

Fenomena munculnya pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, juga tidak lepas dari sebuah fenomena pengangguran. Angka pertumbuhan penduduk yang meningkat di Indonesia pun kian menjadi salah satu faktor dalam memicu adanya mobilitas TKI ke luar negeri. Rendahnya pendapatan per kapita dan tingkat kemakmuran yang kurang merata juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya niatan para TKI yang ingin memperbaiki status hidupnya.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan yakni baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja, atau sedang mempersiapkan sebuah usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Fenomena global yang terjadi pada sebagian besar negara di dunia adalah migrasi internasional yakni termasuk migrasi tenaga kerja. Fenomena ini terus berkembang seiring pola hubungan yang terjalin antar negara, dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antar negara, pada gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi dari/dan ke negara bersangkutan.

Era globalisasi yang sedang berproses seolah telah meniupkan angin optimisme yang tinggi dalam bidang ekonomi melebihi masa lalu dalam peradaban manusia. Era ini ditandai antara lain dengan terbentuknya pasar bebas atau *free trading area* dalam perekonomian dunia. Di sisi lain, pergerakan modal termasuk mobilitas sumber daya manusia sedemikian menarik sehingga fenomena migrasi tenaga kerja internasional tidak terelakan

Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja ke luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integrasi internasional. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global, tidak dapat melepaskan diri dari dinamika tersebut, sehingga pengiriman pekerja migran ke luar negeri berdampak signifikan pada makro ekonomi.

Dalam perkembangannya, negara-negara tujuan TKI dari tahun ke tahun juga terus bertambah. Daerah lain di Indonesia yang juga tanahnya kurang subur membuat warganya kabur dan memilih meninggalkan kampung halaman. Contohnya juga adalah warga Flores, daerah yang memiliki geografis kurang subur menjadi pemicu warga untuk merantau. Pengiriman buruh migran ke luar negeri telah memakan waktu cukup lama. Seiring perjalanan waktu, pengiriman tenaga kerja migran selama sekian lama hingga detik ini terlihat bahwa nasib mereka selama bekerja di luar negeri selalu tersandung masalah. Proses panjang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri meski telah berlangsung lama namun masalah belum selesai.

Itu semua karena motivasi pekerja migran untuk memperbaiki kehidupan yang lebih bagus. Mencari kesejahteraan ke luar negeri meski dilalui dengan penuh rintangan, pengorbanan dan air mata, adalah pilihan yang ternyata masih diminati oleh ribuan warga negara Indonesia yang berpenghasilan kecil.

Banyaknya hutan yang diubah menjadi lahan pertanian, penebangan pohon tidak terkendali, pembakaran lahan, pengerukan bukit, pencemaran air sungai, pencemaran pantai, penebangan bakau, peningkatan pemakaian kendaraan penghasil karbon dioksida secara "*massiv*", penggunaan energi bahan bakar yang tidak tergantikan seperti minyak dan gas adalah faktor yang jauh lebih penting untuk diperhatikan bagi pengambil kebijakan masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, karena jika pemerintah bisa lebih perhatian ke masalah ini maka tenaga kerja kita bisa bekerja di negara sendiri.

Warga Indonesia yang termasuk dalam kelas menengah ke bawah tidak akan meninggalkan kampung halamannya kalau kampung halaman mereka subur, menyediakan sumber alam yang produktif, makmur, tenang, dan damai. Faktor utama warga Indonesia mencari kehidupan di negeri lain karena kerusakan alam yang parah, alam yang tidak bersahabat untuk bertani, penduduk miskin tidak memiliki lahan, dan tanah tidak subur. Faktor lainnya adalah karena cuaca yang tidak menentu, hasil pertanian berkualitas rendah dan murah dibanding biaya produksi, serta lahan berpindah tangan dan dikuasai pemegang modal. Selain itu, yang terpenting adalah mental aparat pemerintah untuk tidak bermental korup. Masalah di atas dianggap sebagai bencana besar yang kita hadapi tanpa mengenal latar belakang pendidikan, suku, ekonomi, agama.

Beberapa faktor penyebab tingginya pergerakan kaum migran untuk bekerja di luar negeri disebabkan antara lain Pertama, tingginya angka pengangguran bagi penduduk berusia produktif namun memiliki pendidikan yang rendah. Kedua, faktor alam di daerah yang tidak mendukung, ekosistem tercemar sehingga sulit untuk bergantung dari alam sebagai

matapencarian (nelayan, petani). Ketiga, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai upaya bantuan pemerintah dan pemberdayaan penduduk seperti permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Pemerintah menyediakan dana bagi penduduk yang berwiraswasta. Keempat, kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

2 Kasus Hukum Atas TKI di Luar Negeri yang Berulang

Dalam hal pengiriman TKI negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pengalaman yang sudah cukup banyak. Dengan beberapa pengalamannya Indonesia seharusnya mampu menyelesaikan beberapa kasus yang menimpa TKI kita yang ada di luar negeri. Ironisnya beberapa kasus hukum yang menyangkut para TKI asal Indonesia kian hari makin meningkat dengan seiring peningkatan pengiriman TKI ke luar negeri. Beberapa kasus yang sedang memanas seolah menjadi raport merah bagi Indonesia yang dipandang tidak bisa menyelesaikan kasus tenaga kerja yang ada saat ini. Seperti yang pernah hangat adalah kasus hukum pancung di negara Arab yang menimpa Ruyati, TKI asal Indonesia ini.

Kasus Ruyati tidak lebih dari sebuah fenomena gunung es, atau *iceberg phenomenon* yang menimpa para tenaga kerja kita di luar negeri. Selain itu, dipastikan lebih banyak dan besar lagi, baik dari segi jumlah maupun kualitas hukumannya yang dialami oleh para pahlawan devisa ini. Menurut Kemenlu sejak tahun 1999 hingga 2011, terdapat 303 warga Indonesia terancam hukuman mati. Dari jumlah itu, tiga di antaranya telah dieksekusi, dua orang dipancung di Arab Saudi dan satu orang di Mesir.

Jumlah ancaman hukuman mati terbesar dialami TKI kita di Malaysia, yakni sebanyak 233 orang. Kemudian di negara China sebanyak 29 orang, dan diikuti oleh Arab Saudi banyak 28 orang. Sebuah angka yang sangat menyedihkan memang karena menyangkut nyawa anak bangsa yang berjuang, membiayai hidupnya di luar negeri.

Munculnya kembali kasus kekerasan yang menimpa para TKI seperti menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini mengambil pelajaran atas berbagai kasus yang sama terjadi di masa sebelumnya. Untuk menyebut sejumlah kasus yang cukup menyita perhatian publik, di antaranya kasus TKI, Nirmala Bonat yang luka parah akibat sering disiksa majikannya pada tahun 2004 dan kasus yang sama juga menimpa Ceriyati, TKW asal Brebes Jawa Tengah pada 2007. Satu tahun kemudian terjadi lagi, seorang TKI, Siti Hajar kabur dari apartemen majikannya, karena tidak tahan sering disiksa pada tahun 2009. Hingga kini, kekerasan terhadap TKI seperti tak pernah usai.

Menurut data Migrant Care (2011), bila berdasarkan negara penempatan, TKI kita banyak mengalami kekerasan itu di negara yang sering mengklaim sebagai negara serumpun, yakni Malaysia. Jumlah kekerasan yang menimpa TKI kita di negara Malaysia ini sebesar 39 persen. Kemudian diikuti oleh Arab Saudi yang sebesar 38 persen. Negara lainnya, seperti Kuwait sebesar 5 persen, Hongkong, Taiwan, dan Yordania masing-masing 3 persen, Brunei Darussalam, Singapura, Bahrain, dan Amerika masing-masing 2 persen. Sebuah besaran yang sangat memilukan apabila dibandingkan dengan pengalaman negara Indonesia yang telah banyak melakukan pengiriman TKI ke negara lainnya seperti Malaysia, Arab, dan lain-lain.

3 Siapakah yang harus bertanggung jawab?

Dalam masalah TKI yang melanda Indonesia ini sesungguhnya bukan sebuah masalah yang ditanyakan tentang siapa sajakah yang harus bertanggung jawab tetapi masalah krusialnya adalah pada penanganan yang baik dalam sebuah sistem yang ada dalam sistem manajemen TKI di Indonesia. Dalam sebuah sistem itu juga tidak lepas juga pada beberapa aktor yang berkepentingan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam sebuah sistem manajemen yang dilakukan dalam mengatasi masalah TKI ini.

Kita semua tahu bahwa dalam sebuah sistem manajemen yang baik juga harus memperhatikan kinerja aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Apakah sudah maksimal ataupun masih dalam tahap percobaan. Jika kita menelisik lebih jauh, masalah TKI yang sedemikian itu seharusnya tidak akan terulang begitu saja dengan mudah. Tanpa adanya sebuah perspektif sistem dan aktor yang baik dalam melihat kasus ini maka yang akan terjadi hanyalah sebuah perulangan yang tanpa ujung dalam penyelesaian masalah yang telah menjadi agenda tahunan ini.

Dalam perspektif sistem kita mengenal beberapa perspektif untuk mendekati sebuah permasalahan diantaranya dengan menggunakan perspektif milik Tacolt Parsons dimana ia menggunakan formulasi AGIL yakni *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola). Selain itu kita juga mengenal tentang perspektif yang dikemukakan oleh Niklas Luhman dimana dia menekankan bahwa sistem itu adalah sebuah proses mendewasakan diri. Adanya *trust* yang akan dibangun itu sangatlah penting karena adanya sebuah proses *self referensial* atau sebuah proses untuk filterisasi diri kita terhadap sebuah kasus atau masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya *publish or not publish* dalam sebuah sistem maka individu akan selalu melakukan *self referensial* yang aktif. Selain itu dalam pendekatan sistem kita juga mengenal adanya pendekatan perspektif milik Anthony Giddens dimana membahas tentang sebuah dualitas strukturasi yang ada dalam sebuah sistem. Apabila kita melihatnya dengan pendekatan aktor kita juga mengenal adanya dua perspektif yang terkenal yakni milik Brian Mc. Nair yang membahas tentang komunikasi politik dalam aktor dan Coleman yang membahas tentang RCT theory.

Dalam kasus TKI ini kita akan melakukan pendekatan melalui aktor-aktor yang berperan dalam kasus TKI ini, yakni PR (*Public Relations*), Aktor Politik, dan Jurnalis. Dalam melihat kasus hukum yang menimpa TKI Indonesia ini kita melihat dari perspektif aktor dimana mereka bertugas sesuai dengan kewajiban masing-masing yang akan membentuk sebuah *public sphere* yang sehat dan bisa menjadi ajang mediasi antara beberapa pihak yang bisa menjadikan sistem manajemen TKI di Indonesia sehat ke depannya.

4 Mediasi Aktor

Dalam melihat kasus TKI yang sedang marak akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa peran aktor di dalam media sangatlah penting dalam menentukan sikap dimana sebuah sistem manajemen TKI ini akan berjalan ke depannya. Di sini kita memiliki beberapa aktor yang menentukan sebuah nasib TKI yang akan dibahas, di satu sisi kita mempunyai PR atau *Public Relations* dimana dalam kasus ini PR sebagai aktor yang menentukan dalam pencitraan yang terjadi di media massa. Selama ini pencitraan yang terjadi di media massa

tidak lepas dari sebuah peran PR dalam memberikan statement untuk membentuk sebuah citra atau *image building* yang terjadi di Indonesia.

PR dalam kasus ini kita tidak akan menunjuk layaknya seperti PR *corporate* yang mikro tetapi kita melihat PR dalam scope makro. Dalam kasus ini yang dimaksud sebagai PR bisa berupa PR negara yang berfungsi memainkan peran pencitraan terhadap sebuah negara. PR di sini bisa sebagai Duta Besar RI, Duta Besar Arab, maupun Menteri Luar Negeri. Dalam hal ini PR sangat memainkan peran dalam mencitrakan sebuah masalah yang sedang muncul di Indonesia seperti kasus TKI Ruyati yang ada di Arab. Ruyati dihukum pancung karena dia dituduh membunuh majikannya yang ada di Arab. Dalam proses hukum terhadap TKI asal Bekasi, Jawa Barat, ini telah terjadi ketidaktransparanan laporan dari pemerintah Arab Saudi, bahkan akses pengacara yang ditunjuk pemerintah Indonesia pun juga dibatasi.

"Sejak diterimanya laporan terkait Ruyati pada Februari 2010, pemerintah juga telah berupaya meminta pengampunan dari pihak keluarga korban, namun tidak diberikan. Ketika proses permintaan pengampunan masih berlangsung, pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan sebelumnya ke pemerintah Indonesia langsung menghukum mati Ruyati," Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan hal ini dalam keterangan pers setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Kamis (23/6) pagi.

Menlu menjelaskan kronologi kasus Ruyati ini dan proses hukumnya serta upaya pemerintah Indonesia. Turut memberikan keterangan pers ini Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Marty kemudian menjelaskan kronologi upaya pemerintah dalam kasus almarhumah Ruyati, 54 tahun. Sejak awal diperoleh berita almarhumah ditahan polisi setempat, Marty menuturkan, KBRI Jeddah telah memberikan pendampingan untuk memastikan hak-hak Ruyati dipenuhi. "Setelah putusan hukuman mati diberikan, diupayakan pengampunan pihak keluarga melalui mediator pihak Arab Saudi. Namun pihak keluarga korban tetap tidak memberikan pengampunan," kata Marty Natalegawa.

Seperti diketahui, pada Januari 2010, Ruyati dituduh membunuh ibu majikannya bernama Khairiya Hamid Mujallid dengan alat pemotong daging. Pada Mei 2010, Ruyati diadili pertama kali dan diancam hukuman Qishas, yakni hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, misalnya hukuman bagi pembunuh adalah hukuman mati jika tidak ada pengampunan dari keluarga korban. Setahun kemudian, majelis hakim di Mekkah memvonis hukuman pancung, yang eksekusinya dijalankan pada 18 Juni 2011.

Di tengah proses permintaan pengampunan yang selalu ditolak keluarga korban itulah, eksekusi dijalankan. Pemerintah Indonesia menyayangkan hal ini karena tanpa pemberitahuan sama sekali dari pemerintah Arab Saudi. Menurut Marty, di dalam persidangan Ruyati secara gamblang mengakui perbuatannya membunuh ibu majikannya. Sesuai dengan hukum syariah Islam yang diterapkan Arab Saudi, maka Ruyati dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM khusus, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman terberat hukuman mati.

Pemerintah telah menyampaikan protes dua kali melalui Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, juga melalui surat kepada Menlu Arab Saudi. Dubes Arab Saudi Abdulrahman Al-Khayyath pun juga telah menyampaikan maaf atas kelalian menyampaikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah memanggil Dubes RI di

Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur untuk pulang ke Indonesia. Selain untuk meminta keterangan, pemulangan Gatot Abdullah ini juga sebagai bentuk protes Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi.

“Satu fakta bahwa kita berhasil membebaskan sembilan orang WNI dari hukuman mati dan bahkan dalam dua tahun terakhir berhasil membebaskan empat WNI dari ancaman hukuman mati. Presiden telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan WNI terlindung dan terhindar dari ancaman hukuman mati,” Marty menjelaskan. Selain itu, Menlu juga menegaskan bahwa dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, pemerintah tidak membedakan antara kelompok dan golongan TKI, mahasiswa, dan lainnya. Tidak membedakan apakah korban penganiyaan, korban tindak pidana ataupun yang dituduh pelaku. Namun, pemerintah tidak akan mengintervensi hukum yang bergulir. Marty juga menyinggung tentang kasus TKI pada pemerintahan Gus Dur, yaitu kasus Siti Zaenab. Hukuman mati terhadap Siti Zaenab ditunda karena anak dari korban saat itu masih berumur 1 tahun, sehingga belum bisa memberikan pengampunan. Kasus ini masih akan diteruskan setelah anak korban tersebut akil baligh.

Dengan adanya statement yang dilontarkan dari berbagai sumber yang berperan sebagai PR negara Indonesia ini sebaiknya bisa menjadikan sebuah wacana informasi bagi masyarakat tetapi yang berupa informasi yang benar-benar sehat, karena akan menentukan citra negara Indonesia di mata dunia tentang TKI yang dikirimnya. Dengan adanya sebuah PR yang berperan sebagai control *issue* maka ia akan mengemban amanat organisasi atau negara dengan baik. Hal tersebut menyangkut adanya informasi yang *publish or not publish* bagi masyarakat. Selain itu adanya koordinasi antara aktor juga harus dilakukan seperti aktor politik.

Dalam situasi yang sangat genting ini, kasus TKI bisa dijadikan sebagai ajang penajaman kekuasaan yang sangat baik. Hal tersebut dikarenakan kepentingan dari aktor-aktor politik yang bermain dalam kasus ini sangatlah krusial memainkan peranan dan akan dibawa kemana arus dari kasus ini. Selayaknya aktor politik biasanya melakukan sesuatu dengan orientasi pribadi atau golongan, hal ini sangat bertentangan pada sebuah kasus TKI yang terjadi karena para aktor TKI tidak boleh memainkan peranan *single* melainkan memainkan kepentingan negara yang sedang dilanda sebuah *issue* internasional yakni Tenaga Kerja Indonesia. Dalam kasus TKI yang melanda Indonesia ini diharapkan aktor politik bisa mengelola *issue* dengan baik dengan melepaskan kepentingan pribadi atau golongannya dan menempatkan kepentingan negara adalah kepentingan yang jauh lebih penting dilakukan karena hal ini menyangkut nama baik negara di mata dunia.

Selain itu salah satu aktor yang berperan dalam kasus TKI ini adalah jurnalis. Sebagai insan yang selalu berdekatan dengan media secara langsung sudah selayaknya jurnalis bisa independen dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yakni untuk memberikan informasi yang sehat kepada masyarakatnya. Dalam kasus TKI kali ini diharapkan jurnalis mempunyai sikap untk berpihak kepada masyarakat, dimana harus menjalankan nilai-nilai jurnalisisme yang benar. Dalam hal ini jurnalis haruslah sebagai pengelola *issue* yang baik dalam melindungi kepentingan publik. Karena di dalam media, jurnalis adalah faktor penting dalam pembentukan fakta media yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan memberikan informasi yang benar bagi masyarakat.

Setelah kita mengetahui siapa saja aktor yang bermain dalam kasus TKI di Indonesia, maka kita akan mencari jalan untuk melakukan sebuah mediasi bersama antara jurnalis, aktor politik dan PR dalam rangka menanggapi kasus TKI ini.

5 Media Sebagai *Public Sphere*

Dalam kasus TKI di Indonesia peran aktor dalam melihat dan menyelesaikan kasus TKI ini haruslah menggunakan sebuah media untuk menentukan sebuah *win-win solution* dalam penyelesaiannya. Diharapkan antar aktor bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai PR diharapkan bisa menjalankan perannya menjadi *issue controlling* demi kepentingan negara Indonesia. Di satu sisi aktor politik juga harus memainkan peran sebagai pengelola *issue* yang baik dan menjadikan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu peran yang tidak kalah pentingnya adalah peran jurnalis sebagai agen informasi yang dekat dengan media. Sebaiknya sebagai seorang jurnalis haruslah bisa independen dalam melihat *issue* yang berkembang demi mendapatkan sebuah fakta media yang benar-benar dipercaya masyarakat.

Dengan masing-masing fungsi yang dimiliki oleh ketiga aktor diharapkan bisa bertemu dalam sebuah media dan membentuk sebuah *public sphere* yang akan bisa menghasilkan sebuah informasi yang akurat dalam melihat sebuah *issue* yang sedang berkembang di dalam masyarakat. *Public sphere* di sini digunakan sebagai ruang untuk membicarakan *issue* publik secara terbuka dan setara atau egaliter. Hal tersebut diharapkan bisa tercipta karena untuk menjamin kepentingan publik agar tidak dimonopoli oleh kepentingan penguasa baik secara ekonomi dan politik.

Dengan bertemunya ketiga aktor dalam pembentuk *public sphere*, diharapkan bisa menjadikan *issue* yang berkembang di dalam masyarakat, berkualitas dan bisa terpercaya. Karena selama ini yang terjadi, tidak adanya sebuah *public sphere* yang sehat dan sangat terkesan seperti adanya lempar tanggungjawab antar aktor yang bermain dalam kasus TKI ini. Diharapkan dengan adanya mediasi antara ketiga aktor tersebut bisa membentuk sebuah *public sphere* yang berkualitas bagi masyarakat khususnya dalam melihat kasus TKI yang terjadi di Indonesia. Selain itu, akan memperkecil dominasi kapitalis ketika kepentingan publik bisa dibicarakan secara setara atau egaliter.

6 Kesimpulan

Dalam hal ini ketiga aktor yakni jurnalis, aktor politik dan PR harus bisa bersinergi dalam mengolah sebuah *issue* yang berkembang menjadi sebuah informasi yang sehat dalam pemberitaan di media. Dimana media di sini dipakai sebagai sebuah alat untuk melakukan mediasi antara ketiga aktor dalam mengelola sebuah *issue* yang berkembang di dalam masyarakat. Di dalam *issue* yang sedang berkembang di dalam masyarakat haruslah benar-benar dijaga agar bisa menjadi sebuah informasi sehat dan berkembang di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*. Polity Press.
- Luhman, Niklas. (2000). *The Reality of the Mass Media*, Polity Press. Cambridge, UK.
- Ormas MKGR. 2011. Dua Opsi untuk BNP2TKI. Melalui:
<http://www.ormasmkgr.org/2011/06/dua-opsi-untuk-bnp2tki/>.
- Sumbawa News. (2014). Marty Natalegawa Jelaskan Kronologi Kasus Ruyati. Melalui:
<http://www.sumbawanews.com/berita/nasional/marty-natalegawa-jelaskan-kronologi-kasus-ruyati.html>.
- Parsons, Talcott. (1975). "*The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology.*" In *Talcott Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory*, New York: The Free Press.
- Progresif Jaya. (2014). Opini: Kronologis dan Fakta Sejarah Awal Penempatan TKI ke Luar Negeri. Melalui:
http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=Kronologis%20dan%20Fakta%20Sejarah%20Awal%20Penempatan%20TKI%20ke%20Luar%20Negeri&kategori_tulisan=Opini.